



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN *INDEKS GINI*

KERJASAMA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PASURUAN

dengan BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PASURUAN





KATA PENGANTAR

Laporan Akhir merupakan finalisasi dari kegiatan “Penyusunan Indeks Gini” yang sebelumnya telah diawali dengan Laporan Pendahuluan Penyusunan Indeks Gini. Secara garis besar, Laporan Akhir ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang, permasalahan, tujuan, sumber data dan sistematika tulisan.

Bab II Konsep dan Metodologi yang membahas konsep definisi, pengertian ketimpangan, pendekatan penghitungan ketimpangan kepadatan dan metodologi.

Bab III Analisa dan Pembahasan yang berisi tentang gambaran ekonomi Kota Pasuruan, pengeluaran rumah tangga, dan kesenjangan distribusi pendapatan.

Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Penyusunan Indeks Gini semoga dapat dipergunakan untuk tujuan kemajuan Kota Pasuruan tercinta ini. Semoga bermanfaat.

Pasuruan, Nopember 2018

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pasuruan**

**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik
Kota Pasuruan**

Ir. ARIF JOKO SUTEJO, MM

FENDY KRISDIYONO, SP, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Sumber Data	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II KONSEP DAN METODOLOGI	7
2.1 Konsep Definisi	7
2.2 Pengertian Ketimpangan	10
2.3 Pendekatan Penghitungan Ketimpangan Pendapatan	11
2.4 Metodologi	19
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN	23
3.1 Gambaran ekonomi Kota Pasuruan	23
3.2 Pengeluaran rumah tangga	30
3.3 Kesenjangan distribusi pendapatan	33
BAB KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (Juta) Kota Pasuruan 2013– 2017	24
Tabel 3.2 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan 2013 - 2017	25
Tabel 3.3 Persentase rata rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok makanan 2017	31
Tabel 3.4 Persentase rata rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok non makanan 2017	32
Tabel 3.5 Indeks Gini Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur 2014 - 2017	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 PDRB perkapita Kota Pasuruan 2013 - 2017	24
Gambar 3.2 IPM Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur 2017	28
Gambar 3.3 Rata rata pengeluaran rumah tangga sebulan 2017	30
Gambar 3.4 Persentase rata rata pengeluaran rumah tanggasebulan 2017	31
Gambar 3.5 Koefisien gini kota pasuruan	34
Gambar 3.6 Perkembangan indeks gini kota pasuruan 2014 – 2017	35
Gambar 3.7 Indeks Gini Kota Kota Di Provinsi Jawa Timur 2017	40
Gambar 3.8 Indeks Gini Kota Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur 2014 – 2017	41

BAB I

PENDAHULUAN

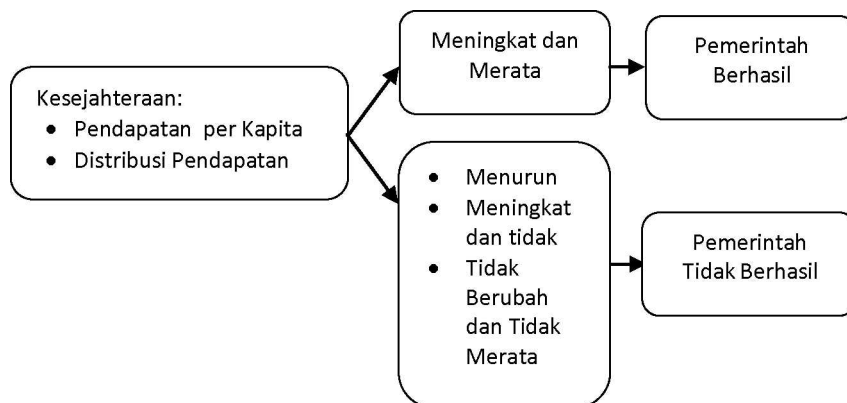
1.1. Latar Belakang

Dalam era pembangunan ekonomi yang semakin terbuka, ekonomi makin berorientasi padapasar, peluang dari keterbukaan dan persaingan pasar tetapipada hakekatnyapembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi, pengukuran kinerja pembangunan daerah umumnya menggunakan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan terjemahan dari laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hal ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan daerah berorientasi pada pertumbuhan PDRB yang tinggi.Keberhasilan yang cukup memuaskan diberbagai bidang dan sektor pembangunan yang diukur dengan Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan peningkatan yang terus menerus yang mengarah pada peningkatan *share* kelompok primer dan mengurangi peran sektor pertanian. Secara ekonomi makro pembangunan ini membuat struktur perekonomian menjadi kokoh.

Kota Pasuruan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki letak sangat strategis.Pada Tahun 2017 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mencapai 5.47 persen.Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di atas 5 persen selama periode 2013- 2017, maka secara makro ekonomi pembangunan ekonomi di Kota Pasuruan dapat dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian dan memiliki struktur perekonomian yang kokoh.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam serta isu-isu perekonomian makro suatu daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), penyerapan tenaga kerja (*employment*), dan pemerataan yang berkaitan dengan penyediaan umum dasar (*basic public service*).

Namun perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali mengabaikan aspek pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Mengingat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, penambahan modal akan lebih berperan daripada penambahan tenaga kerja. Proporsi faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akan berpengaruh terhadap balas jasa yang akan diterima oleh masing-masing faktor produksi tersebut



Pertumbuhan ekonomi merefleksikan perkembangan aktifitas perekonomian daerah, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah apakah keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Pasuruan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya?, Apakah hasil pembangunan ekonomi tersebut merata dinikmati oleh masyarakat Kota Pasuruan?, Apakah pembangunan telah merata di semua wilayah Kota Pasuruan?, Untuk melihat hal tersebut tentunya diperlukan ukuran-ukuran (indikator) yang dapat menggambarkan kondisi tersebut.

1.2. Permasalahan

Kota Pasuruan merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Timur yang memiliki area tidak luas dengan karakteristik potensi wilayah (kecamatan) sedikit beragam, sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi penduduk yang berbeda, serta memiliki topologi wilayah yang sedikit beragam. Keadaan ini menimbulkan perbedaan kecepatan pembangunan pada masing-masing kecamatan. Secara kasat mata wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang ditopang oleh industri pengolahan pembangunan ekonominya apakah lebih cepat dibanding wilayah lainnya, akan tetapi ada juga wilayah bukan wilayah industri tetapi wilayah tersebut merupakan wilayah perumahan yang penduduknya relatif mapan, ada pula daerah yang secara potensi wilayahnya tinggi karena memiliki potensi pertanian tetapi perekonomian masyarakatnya relatif rendah.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka perlu dilakukan kajian yang dapat melihat tingkat kesenjangan baik dilihat sisi ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah. Gini rasio merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk, untuk melihat

karakteristik ketimpangan lainnya dapat menggunakan data PDRB perkapita sebagai *proxy pendapatan perkapita*. Untuk memenuhi indikator ketimpangan tersebut Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dan Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan membuat publikasi dengan judul "Penyusunan Indeks Gini"

1.3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat indikator yang memberikan gambaran proporsi tingkat pendapatan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah secara umum serta sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah. Dari kegiatan ini diharapkan dapat;

- Memberi gambaran tentang pendapatan perkapita masyarakat
- Memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi
- Memberikan gambaran tentang pengeluaran konsumsi perkapita
- Menggambarkan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk dengan penghitungan Koefisien Gini, dan Ketimpangan Menurut Bank Dunia

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan data hasil survei Pola konsumsi dan Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS Kota Pasuruan tahun 2017, Untuk melengkapi kajian digunakan juga beberapa sumber data lain seperti data PDRB, IPM, dan lain-lain tahun sebelumnya (tahun 2014 - 2017) yang tersedia datanya sebagai gambaran awal dalam membuat kajian analisis keterbandingan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan meliputi :

- **Bab I Pendahuluan** yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, sumber data dan sistematika penulisan
- **Bab II Konsep dan Metodologi** yang berisi konsep dan definisi yang digunakan dan metodologi penghitungan
- **Bab III Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Pasuruan** berisi tentang pendapatan perkapita dengan dua metode pendekatan, yaitu pengeluaran perkapita dan PDRB perkapita
Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan antar Golongan Pendapatan Penduduk, berisi ukuran distribusi pendapatan
- **Bab IV Kesimpulan dan Saran**

BAB II

KONSEP DAN METODOLOGI

2.1. KONSEP DAN DEFINISI

Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat, baik kemampuan memenuhi kebutuhan hidup makanan maupun non makanan. Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah - masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Menurut Atkinson (1976) yang dikutip oleh Rusli, et.al (1996) mendefinisikan bahwa ketidakmerataan pendapatan sebagai perbedaan, persebaran, atau pemusatan pendapatan, yang keseluruhannya berpangkal pada ketidaksamaan dilihat secara kumulatif. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin besar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas. Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan upaya untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets

menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tetapi mengikuti perumusan sebagai berikut: $A = \frac{N}{X^b}$

Dimana :

A = Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X,

N = Jumlah penduduk total,

b = parameter yang nilainya antara 1 dan 2.

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto, menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya. Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Ismoro, 1995 yang dikutip oleh Rahayu,dkk., 2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Pengukuran masalah pemerataan telah sejak lama menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun, pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dari distribusi pendapatan adalah *Gini Coefficient* yang dibantu dengan menggunakan *Lorentz curve*. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini di

dekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumahtangga sebagai *proxy* pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, *Indeks Theil* dan *Indeks-L*.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

PDRB perkapita sebagai *proxy* dari pendapatan perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB/PDRN dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata), Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu

daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

2.2 PENGERTIAN KETIMPANGAN

Kesenjangan dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dan yang terendah. Dalam konteks ekonomi Aspek "keadilan dan pemerataan" selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah (Raksaka Mahi, 2000).

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. **Dalam** kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Selain itu ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut :

- Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat *aditif* antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*subgroup*).

- Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antarwaktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

Pada saat membahas kesenjangan pendapatan golongan penduduk akan terkait dengan perbandingan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, ini menimbulkan konsep "garis kemiskinan" (*poverty line*) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Penduduk yang berada di garis kemiskinan (*absolute poverty*) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan kesehatan dan lainnya.

2.3 PENDEKATAN PENGHITUNGAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

2.3.1 Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik (Bappenas, 2002). Menurut Cobwell (1977)

yang dikutip oleh Mitchell (1991) menyatakan bahwa pengukuran ketidakmerataan dapat menggunakan *gini coefficient*. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i \times (F c_i + F c_{i-1})$$

dimana:

GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

$f p_i$ = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$F c_i$ = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$F c_{i-1}$ = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Nilai Koefisien Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai Koefisien Gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi.

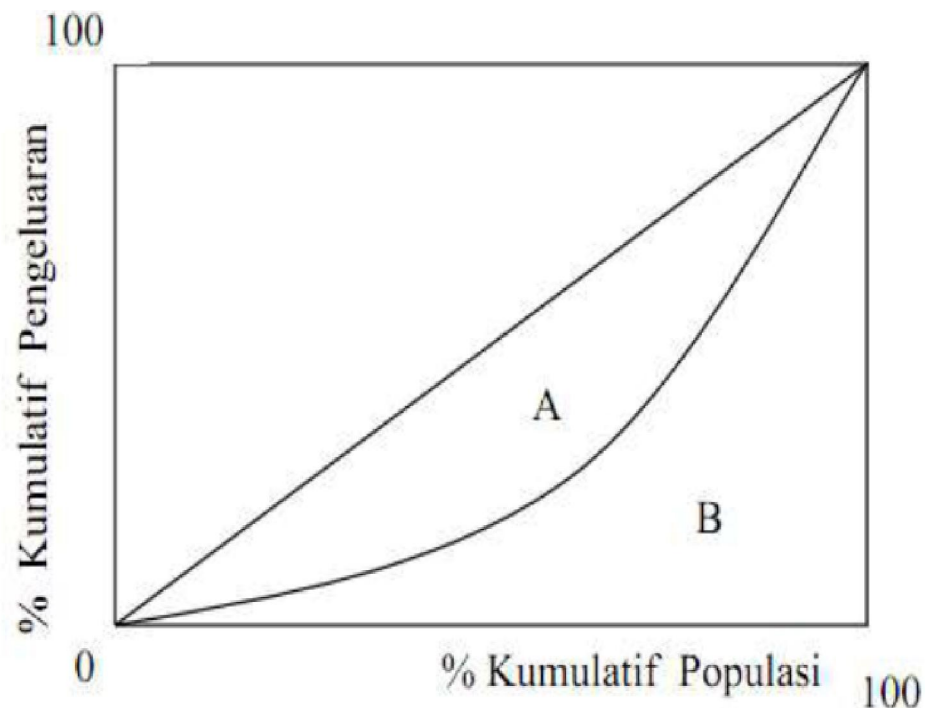
Untuk publikasi resmi BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun Koefisien Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran. Menurut Todaro (1981) angka *Gini Coeficient* untuk negara-negara sedang berkembang dinyatakan bahwa distribusi pendapatan sangat timpang

jika angka gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif sama ketimpangannya
jika angka gininya antara 0,2 sampai 0,3

Selain itu, tingkat ketimpangan dapat diukur juga melalui *personal incomedengan* menggunakan Kurva Lorenz, yaitu yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara persentase populasi penerima pendapatan dengan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama jangka waktu tertentu, seperti terlihat pada Gambar (Santosa dan Prayitno, 1996 yang dikutip oleh Rahayu, dkk., 2000). Pada gambar tersebut, sumbu horisontal mewakili jumlah populasi penerima pendapatan dan sumbu vertikal menggambarkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing presentase penduduk (Todaro,1981). Garis Kurva *Lorenz* akan berada di atas garis horisontal, bila kurva tersebut menjauh dari kurva diagonal maka tingkat ketimpangan akan semakin tinggi.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk Koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal. Koefisien Gini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, gambarlah grafik persentase kumulatif rumah tangga (dari termiskin hingga terkaya) pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran

(pendapatan) pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada gambar 2



Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. **Pertama**, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. **Kedua**, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan. Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada

ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi Untuk itu ditentukankriteria sebagai berikut:

- Ketimpangan taraf Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,35$
- Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0,35 - 0,5$
- Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

2.3.2. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatanseluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/Menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah

2.3.3. INDEKS WILLIAMSON

Ukuran ketimpangan pendapatan lainnya yang lebih penting lagi untuk dikaji adalah kesenjangan antar wilayah/ daerah dengan menggunakan perhitungan *indeks Williamson*. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah dengan rumus :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

V_w = indeks Williamson

Y_i = pendapatan per kapita di kecamatan ke i

Y = pendapatan per kapita rata-rata seluruh kecamatan

F_i = jumlah penduduk di kecamatan i

n = jumlah penduduk kabupaten

Ini berarti bahwa pada dasarnya *indeks Williamson* merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis

2.3.4 Indeks Theil dan Indeks-L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas), Di antaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan "*generalized entropy*". Rumus "*generalized entropy*" secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

Dimana \bar{y} adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya).

Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE (1) disebut sebagai indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

- GE (0), juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y).

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.

2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
3. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

2.4 METODOLOGI

2.4.1 SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Untuk melengkapi digunakan juga beberapa sumber data lain seperti data PDRB, IPM, dan Kemiskinan.

2.4.2 DEFINISI

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makandari satu dapur dalam pengertian bahwa kebutuhan sehari-hari diurus bersama-samamenjadi satu.

Anggota Rumah Tangga / Penduduk

Rumah Tangga (ART)/ penduduk adalah orang yang biasanya tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di dalam rumah tangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Yang bepergian walaupun kurang dari enam bulan tetap di dalam rumah tangga dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah enam bulan

atau lebih, tidak dianggap sebagai ART. Orang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan atau lebih atau yang telah tinggal di dalam rumah tangga kurang dari enam bulan tetapi berniat tinggal enam bulan atau lebih dianggap sebagai ART.

Pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok yaitu konsumsi makanan dan bukan/non makanan (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan keperluan untuk pesta dan upacara). Konsumsi tersebut tanpa memperhatikan asal barang (membeli atau hasil sendiri atau pemberian) dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau diberikan kepada pihak lain.

Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Namun disadari, bahwa informasi pendapatan ini tidak seperti yang diharapkan, dimana banyak responden cenderung memberikan informasi pendapatan yang tidak sebenarnya. Oleh sebab itu, data pendapatan sendiri diperkirakan dari data pengeluaran dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka.

3.3. Teknik Analisis

Teori atau ukuran-ukuran yang digunakan dalam tulisan ini adalah Teori Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Sedangkan untuk data pendapatan didekati dengan data pengeluaran (konsumsi) rumah tangga.

Gini Ratio

Angka Gini Ratio terletak antara 0 - 1 dan apabila angka ini makin mendekati 0(nol) berarti semakin rendah tingkat ketimpangannya. Sebaliknya apabila angka ini semakin mendekati 1 (satu) berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan (jurang pemisah antara si kaya dan si miskin lebar).

Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

0,00 < G < 0,35 → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah

0,35 < G < 0,50 → pemerataan / ketimpangan sedang

G > 0,50 → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Kriteria Bank Dunia

Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu 40 persen kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40 persen kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen kelompok berpendapatan tinggi. Pengelompokan seperti ini pada dasarnya sama dengan menggunakan cara desil (*decile*) yaitu 40 persen pertama sama dengan desil ke-4; 40 persen kedua sama dengan desil ke-8 dan 20 persen terakhir adalah desil ke-10.

Dalam menentukan besarnya desil ke-i digunakan rumus :

$$D_i = Q_b + \frac{(n_i - P_i)}{(P_a - P_b)} (Q_a - Q_b)$$

i = 1, 2, 3, ... 10

n_i = Persentase ke-i

D_i = Desil ke-i

Q_b = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sebelum D_i

Q_a = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sesudah D_i

P_b = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sebelum D_i

P_a = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sesudah D_i

Kriteria ketimpangan diukur berdasarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok berpendapatan rendah. Jika bagian pendapatan yang diterima kelompok ini :

Kurang dari 12 persen → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

12 persen - 17 persen → pemerataan / ketimpangan sedang

Di atas 17 persen → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah

BAB III

ANALISADAN PEMBAHASAN

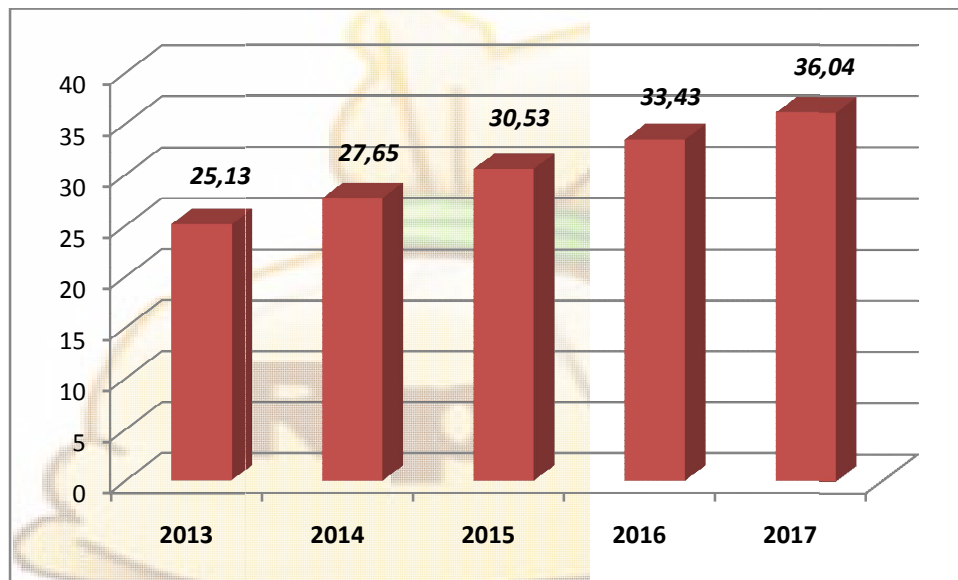
3.1 Gambaran Ekonomi Kota Pasuruan

Ketersediaan data pendapatan perkapita untuk daerah di Indonesia dapat dikatakan tidak tersedia, oleh karena itu pengukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah umumnya didekati dengan dua pendekatan (*proxy*) pendapatan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan Pengeluaran Konsumsi Perkapita. Walaupun kedua nilai tersebut tidak menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran pendapatan penduduk untuk dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Tingkat pendapatan suatu wilayah selain dari kemampuan ekonomi wilayah tersebut juga tergantung jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, jadi wilayah yang mempunyai nilai PDRB tertinggi belum tentu memiliki PDRB perkapita yang tinggi pula apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat tinggi. Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB perkapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kota Pasuruan (*Net Factor Income From Abroad*). Sehingga

pendapatan perkapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar-masuk Kota Pasuruan tersebut, menyebabkan PDRB perkapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.

Gambar 3.1. PDRB Perkapita Kota Pasuruan, 2013 -2017 (juta Rp)



PDRB per kapita Kota Pasuruan merupakan gambaran PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Kota Pasuruan. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai total PDRB atas harga berlaku dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Penduduk Kota Pasuruan adalah mereka yang tinggal di Kota Pasuruan lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap, yang memiliki kartu identitas Kota Pasuruan maupun bukan. Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, nilai PDRB perkapita Kota Pasuruan terus meningkat. Pada tahun 2013, nilainya mencapai 25,13 juta rupiah dan meningkat di tahun berikutnya menjadi 27,65 juta rupiah. Nilai tersebut terus meningkat di tiga tahun berikutnya, hingga di tahun 2017 PDRB perkapitanya mencapai 36,04 juta rupiah. Peningkatan tersebut tidak serta merta menunjukkan peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Pasuruan. Akan

tetapi, paling tidak informasi ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan di masyarakat.

Berdasarkan penghitungan atas dasar harga berlaku, PDRB perkapita Kota Pasuruan pada tahun 2017 mencapai Rp. 36,04 juta. Walaupun angka ini masih belum dikurangi dengan pendapatanyang keluar-masuk Kota Pasuruan, namun telah menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu limatahun terakhir.

Salah satu konsekuensi dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhanadalah ketimpangan distribusi pendapatan.Dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2017 mencapai7.125.190 juta rupiah dan Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun (2013 - 2017)mampu tumbuh dengan rata-rata di atas 5 % (lihat Tabel 3.1 dan 3.2) maka dapat dikatakanekonomi makro kota pasuruan menunjukkan perkembangan yang cukup baik selamalima tahun tersebut.Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kota Pasuruan,pendapatan masyarakat yang terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (JutaRp) Kota Pasuruan

2013 - 2017

Tahun	PDRB Atas Harga Berlaku	PDRB Atas Harga Konstan
2013	4,833,194	4,315,124
2014	5,346,074	4,561,264
2015	5,949,433	4,813,310
2016	6,560,009	5,076,354
2017	7,125,190	5,354,090

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pasuruan 2013 - 2017

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	0,52	1,37	2,04	1,91	-1,23
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-2,45	-2,19	-2,62	-1,97	- 0,87
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,51	5,37	5,78	4,20	4,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,12	7,52	-3,19	2,95	4,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	1,25	1,04	2,25	2,46	4,18
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,47	4,86	4,31	6,91	8,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,39	5,45	5,13	5,48	6,41
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,00	5,70	5,44	6,57	7,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	12,26	12,83	8,80	9,00	9,12
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,91	7,29	7,23	7,39	6,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	11,23	7,79	6,68	6,08	2,87
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,70	3,05	3,04	3,25	2,84
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	8,17	6,78	6,72	6,22	6,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,14	0,82	4,43	4,03	2,58
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	8,46	7,57	6,95	5,90	3,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,78	5,83	3,27	3,71	4,06
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,19	3,95	3,16	3,14	4,09
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		6,51	5,70	5,53	5,46	5,47
* Angka sementara/ <i>Preliminary Figures</i>						
** Angka sangat sementara/ <i>Very Preliminary Figures</i>						

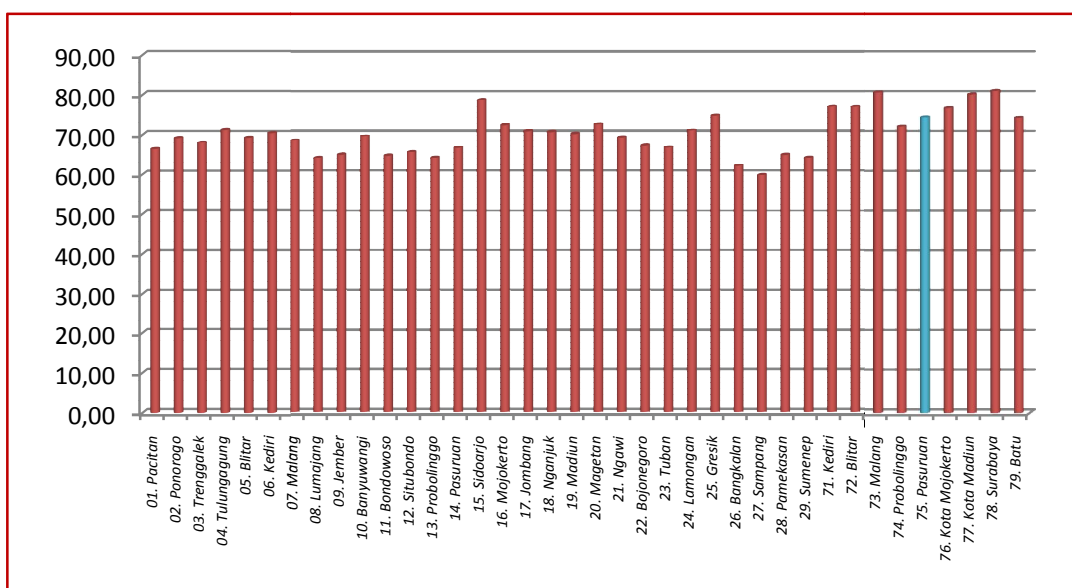
Setidaknya ada 6 lapangan usaha yang laju pertumbuhannya diatas 6 persen di tahun 2017. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2017 adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhannya pada angka 9,12 persen. Persentase ini sedikit lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 9,00 persen, ada kenaikan 0,12 persen. Begitupula pada lapangan usaha Konstruksi mengalami kenaikan hingga diatas 2 persen di banding tahun 2016, dengan angka pertumbuhan mencapai 8,97 persen. Dari kedua lapangan usaha tersebut, yang mengalami pertumbuhan yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan, pertumbuhan lapangan usaha ini menunjukkan masyarakat Kota Pasuruan yang konsumtif terhadap makanan jadi. Wisata kuliner yang semakin banyak digandrungi masyarakat menyebabkan semakin menjamurnya gerai-gerai makanan baik yang bersifat konvensional/tradisional maupun waralaba yang semakin beragam, pesatnya pertumbuhan penyedia Makan dan Minum misalnya juga tidak lepas pola masyarakat yang sudah sangat mengenal *delivery services*. Pada Lapangan usaha Konstruksi di Kota Pasuruan terdapat perbaikan jalan, dan pembangunan jalan tol.

Pada dasarnya pembangunan terdiri dari dua aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial, salah satu indikator dari aspek ekonomi adalah PDRB perkapita sedangkan dari aspek sosial adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia dalam salah satu wilayah tertentu. Peningkatan pembangunan ekonomi diharapkan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong

peningkatan kualitas sumber Daya Manusia (SDM), demikian pula peningkatan kualitas SDM akan turut membantu meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi yang membantu peningkatan penciptaan nilai tambah kegiatan ekonomi. Dengan melihat keterkaitan tersebut maka dapat dilihat hubungan antara aspek ekonomi yang diukur dengan PDRB perkapita dan kualitas manusianya yang diukur dengan IPM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/penduduk di suatu daerah. IPM juga merupakan salah satu indikator target dan tolok ukur keberhasilan pembangunan, pun digunakan juga sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), dalam pengukuran komponen IPM itu sendiri terdiri dari indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan separitas daya beli. Sebagai indikator pembangunan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan pada tahun 2017 menduduki rank 9 di Provinsi Jawa Timur, dengan nilai IPM sebesar 74,39 dimana IPM Kota Pasuruan berada di atas angka IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 70,27

Gambar 3.2 IPM Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur 2017



Secara umum IPM Kota Pasuruan berada di atas Kota Probolinggo dan Kota Batu, tetapi dibawah enam kota lain seperti Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan perlu menjadi perhatian agar kualitas manusia di Kota Pasuruan semakin lebih baik lagi ke depan.

3.2. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dapat diukur dari pendapatan masyarakat yang diterimanya, yang dalam Susenas digunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga. Namun demikian, penggambaran tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pendapatan sangat sulit dilakukan karena masyarakat pada umumnya sukar untuk mencatat dan mengingat arus pendapatan serta jenisnya atau juga oleh sebab-sebab lain. Oleh karena itu, pendapatan rumahtangga diperkirakan dari data pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran rumahtangga dibedakan menurut pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Kedua jenis pengeluaran tersebut dapat menjelaskan dengan baik bagaimana pola konsumsi masyarakat Kota Pasuruan secara umum.

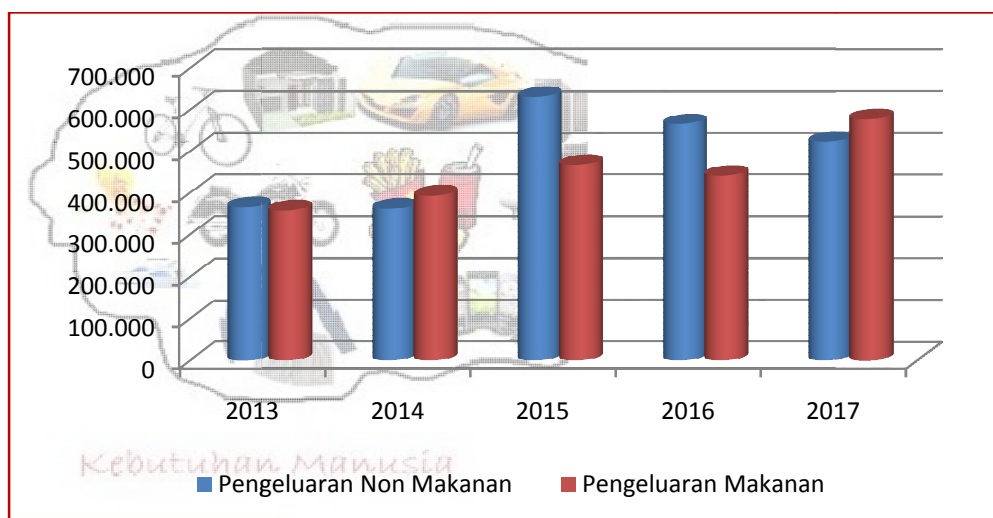
Di negara-negara berkembang, pengeluaran untuk keperluan makanan merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumahtangga. Sebaliknya di negara yang sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran yang sudah dianggap tidak primer lagi mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur antara lain melalui besarnya pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran penduduk untuk kebutuhan konsumsi dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi penduduk. Secara

umum kemampuan ekonomi (daya beli) penduduk akan dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk kebutuhan makanan ke pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran rumah tangga terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

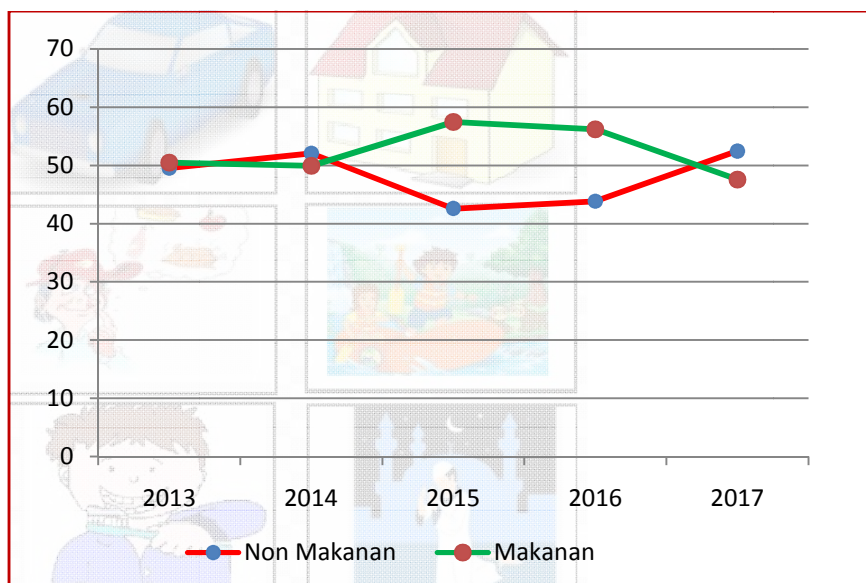
Gambar 3.3
Rata Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan
Rumahtangga Sebulan Tahun 2013–2017



Sumber : Susenas 2017

Gambar 3.3 memperlihatkan besarnya nilai nominal pengeluaran makanan dan non makan perkapita sebulan tahun 2013 – 2017. Pada tahun 2013 pengeluaran makanan mencapai Rp. 358.719,- dan pada 2014 menjadi Rp.394.125,- atau naik 8,98 persen, sedangkan untuk pengeluaran non makanan mengalami penurunan sedikit dari tahun 2013 ke 2014 yaitu hanya 0,82 persen. Pada tahun 2015 pengeluaran non makanan, naik secara signifikan di tahun 2015 menjadi Rp.630.428, begitupula pengeluaran makanan juga mengalami kenaikan signifikan mencapai 18,54 persen. Pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran makanan penduduk Kota Pasuruan sebesar Rp440.873,- dan pengeluaran non makanan sebesar Rp. 565.021, Sedangkan pada tahun 2017 pola pengeluaran makanan sebesar Rp. 577.040,- dan pengeluaran non makanan Rp. 522.848,-

Gambar 3.4 Persentase Pengeluaran rumah tangga 2013 - 2017



Sumber : Susenas 2017

Persentase pengeluaran makanan dan non makanan di kota pasuruan masih berfluktuasi, Gambar3.4 Pada tahun 2013, persentase pengeluaran non makanan sebesar50,46 persen dan pengeluaran makanan sebesar 49,54 persen, berarti pada tahun 2013 pola komsumsi rumah tangga masih cenderung lebih banyak non makanan.Tahun 2014 terjadi perubahan pola komsumsi masyarakat, terjadi pergeseran lagi dimana konsumsi makanan lebih tinggi (52,10 persen) dari pada konsumsi non-makanan(49,90 persen). Pada tahun 2015 terjadi pergeseran kembali dimana pengeluaran non makanan lebih tinggi

daripada pengeluaran makanannya. Pengeluaran untuk makanan mencapai 42.57 persen sedangkan untuk non makanan mencapai 57.43 persen. Sementara di tahun 2016 juga pola konsumsi non makanan masih lebih besar dibanding dengan pengeluaran makanan yakni sebesar 56,17 persen untuk konsumsi non makanan dan 43,83 persen untuk konsumsi makanan, Sedangkan pada tahun 2017 terjadi pergeseran kembali di mana konsumsi makanan 52,46 persen dan konsumsi non makanan 47,54 persen. Untuk mengetahui gambaran umum dari konsumsi masyarakat pada tahun 2017, baik makanan dan non makanan dapat di lihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.4.

Tabel 3.3 Persentase Pengeluaran Rata Rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan Tahun 2017

Kelompok Makanan	Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Padi-padian	10.30
Umbi-umbian	0.71
Ikan	7.20
Daging	5.09
Telur dan susu	6.99
Sayur-sayuran	5.67
Kacang-kacangan	3.02
Buah-buahan	5.45
Minyak dan lemak	2.04
Bahan minuman	2.80
Bumbu-bumbuan	1.46
Konsumsi lainnya	1.69
Makanan dan minuman jadi	39.31
Tembakau dan sirih	8.26
Jumlah/Total	100
Rata Rata Pengeluaran Makanan (Rp)	577 070

Pengeluaran perkapita rumah tangga sebulan pada tahun 2017, memiliki porsi komoditi makanan dan minuman jadi sebesar 39,31persen, kemudian komoditi padi padian mencapai 10,30 persen, dan untuk komoditi tembakau dan sirih mencapai 8,26 persen.

Sedangkan untuk rata rata pengeluaran non makanan dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, bahan bakar, penerangan dan air mencapai 47,09 persen, untuk kebutuhan aneka barang dan jasa mencapai 28,69 persen, kebutuhan barang yang tahan lama mencapai 9,96 persen, sedangkan kebutuhan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala sebesar 6,04 persen, dan sisanya untuk kebutuhan pajak, pesta dan upacara.

Tabel 3.4 Persentase Pengeluaran Rata Rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan Tahun 2017

Kelompok Non Makanan	Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	47.09
Aneka barang dan jasa	28.69
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	6.04
Barang yang tahan lama	9.96
Pajak pemakaian dan premi asuransi	6.72
Keperluan pesta dan upacara	1.50
<i>Jumlah/Total</i>	100
Rata Rata Pengeluaran Non Makanan (Rp)	522 848

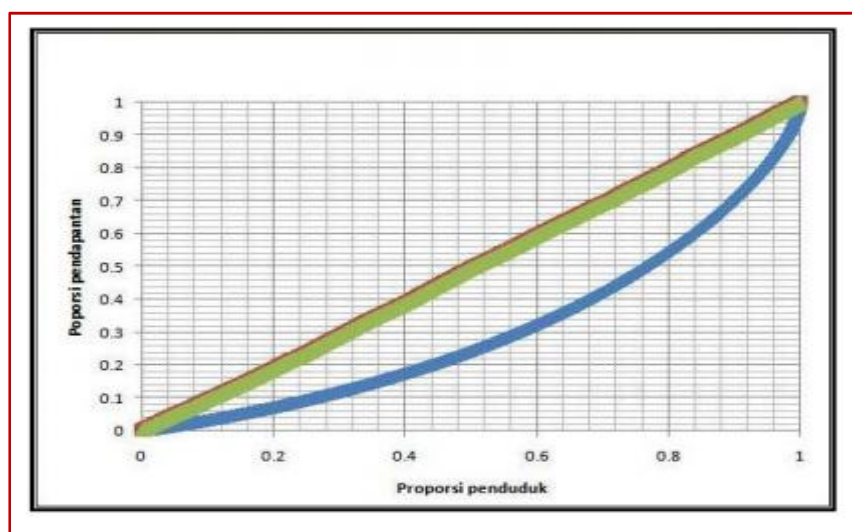
3.3 KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

3.3.1 Koefisien Gini (Gini ratio)

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif, berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Koefisien

Gini (Gini Ratio) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menilai ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna dengan luas area di bawah kurva Lorenz. Koefisien Gini berikut ini didasarkan data SUSENAS mengenai pengeluaran rumah tangga di Kota Pasuruan tahun 2014 - 2017.

Gambar 3.5 Koefisien Gini dengan Kurva Lorenz



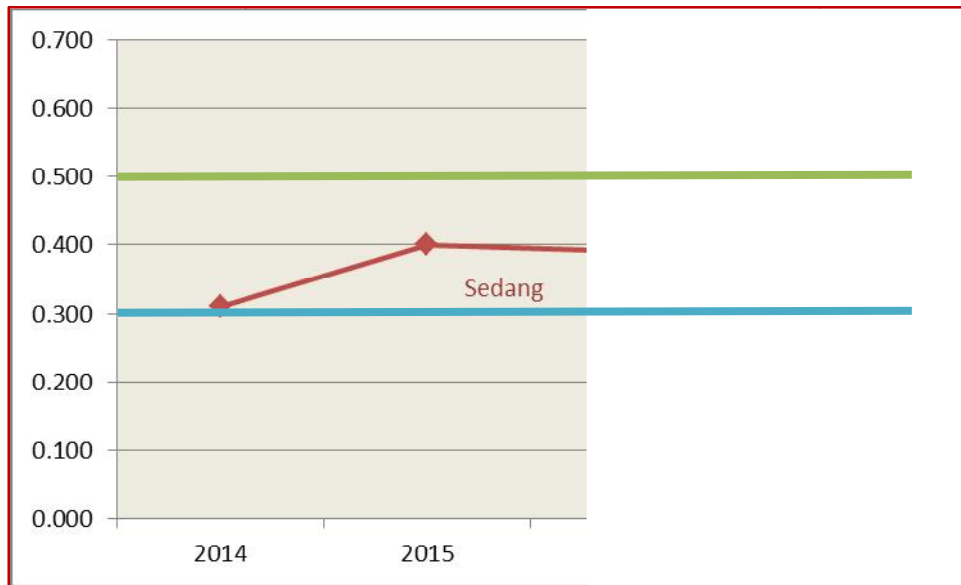
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka Koefisien Gini untuk seluruh rumah tangga sampel pada tahun 2017 sebesar 0,380. Hal ini berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Pasuruan pada tahun 2017 dikategorikan sebagai tingkat “ketimpangan sedang”, dengan ini mengindikasikan dari sampel rumah tangga penerima pendapatan, memperoleh sekitar 38persen dari distribusi pendapatan yang ada. Pada tahun 2017 nilai koefisien gini mengalami penurunan di banding tahun 2016, terjadi penurunan koefisien gini sebesar 0,015 persen dimana angka Koefisien Gini untuk seluruh rumah tangga sampel pada tahun 2016 sebesar 0,397, ini terlihat sama dengan tahun sebelumnya pada tahun 2016 yang juga berkategori dikategorikan sebagai tingkat “ketimpangan sedang”. Sementara tahun 2015 hasil

perhitungan tersebut, maka distribusi pendapatan di Kota Pasuruan pada tahun 2015 juga termasuk kategori ketimpangan sedang yaitu dengan nilai gini sebesar 0,391. Selanjutnya pada tahun 2014 indeks gini di kota Pasuruan tercatat 0,308. Hal ini merupakan indeks gini terendah selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Bahkan dilihat dari ranking kota pasuruan menduduki peringkat 20 dari 38 kabupaten/ kota di provinsi jawa timur. Peringkat terbaik bagi kota pasuruan selama kurun waktu 2014 – 2016.

Dalam tiga kurun waktu tiga terakhir yaitu pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 mengalami tren penurunan angka koefisien gini, ini berarti ketimpangan semakin menurun. Pada tahun 2017 indeks gini kota pasuruan ranking 32 dari 38 kabupaten/ kota di provinsi jawa timur. Hal ini berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kota pasuruan menembus batas ketimpangan sedang, maka dari tiga tahun terakhir kota pasuruan nilainya semakin naik, tetapi pada tahun 2017 ada sedikit penurunan, ini berarti ada penurunan dari ketimpangan distribusi pendapatan penduduk kota pasuruan di banding tahun 2016. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir indeks gini kota pasuruan lebih rendah dibandingkan indeks gini provinsi jawa timur, pada tahun 2014, nilai indeks gini provinsi jawa timur sebesar 0.37 meningkat tahun 2015 sebesar 0,42 ini, sedangkan pada tahun 2017 indeks gini provinsi jawa timur sebesar 0.4, mengindikasikan indeks gini kota pasuruan lebih rendah dibandingkan provinsi jawa timur, tetapi pada tahun 2017 indeks gini kota pasuruan mengalami penurunan tipis, ini merupakan hal positif telah ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, tetapi untuk ke depan tetap menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya dalam memperhatikan jumlah

penduduk miskin, walaupun indeks gini berada dalam level ketimpangan distribusi pendapatan sedang.

Gambar 3.6 Perkembangan Indeks Gini Kota Pasuruan 2014 - 2017



Tabel 3.5 Indeks Gini Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2017

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
01. Pacitan	0.310	0.329	0.357	0.32
02. Ponorogo	0.309	0.358	0.364	0.34
03. Trenggalek	0.311	0.370	0.392	0.35
04. Tulungagung	0.310	0.360	0.368	0.35
05. Blitar	0.304	0.328	0.344	0.37
06. Kediri	0.310	0.336	0.382	0.34
07. Malang	0.333	0.376	0.324	0.35
08. Lumajang	0.234	0.290	0.346	0.31
09. Jember	0.262	0.329	0.310	0.34
10. Banyuwangi	0.288	0.342	0.334	0.34
11. Bondowoso	0.275	0.320	0.346	0.32
12. Situbondo	0.292	0.332	0.348	0.33
13. Probolinggo	0.316	0.298	0.312	0.36
14. Pasuruan	0.283	0.323	0.315	0.34
15. Sidoarjo	0.301	0.346	0.370	0.34
16. Mojokerto	0.268	0.314	0.301	0.32
17. Jombang	0.319	0.322	0.338	0.34
18. Nganjuk	0.304	0.346	0.355	0.33
19. Madiun	0.279	0.324	0.341	0.32
20. Magetan	0.320	0.338	0.370	0.39
21. Ngawi	0.336	0.341	0.342	0.34

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
22. Bojonegoro	0.285	0.319	0.318	0.29
23. Tuban	0.243	0.292	0.332	0.31
24. Lamongan	0.272	0.300	0.304	0.32
25. Gresik	0.282	0.312	0.325	0.29
26. Bangkalan	0.326	0.322	0.312	0.33
27. Sampang	0.233	0.302	0.305	0.29
28. Pamekasan	0.257	0.338	0.361	0.33
29. Sumenep	0.246	0.260	0.306	0.24
71. Kota Kediri	0.310	0.397	0.389	0.40
72. Kota Blitar	0.350	0.374	0.408	0.39
73. Kota Malang	0.373	0.376	0.414	0.42
74. Kota Probolinggo	0.332	0.361	0.305	0.37
75. Kota Pasuruan	0.308	0.391	0.397	0.38
76. Kota Mojokerto	0.313	0.356	0.374	0.39
77. Kota Madiun	0.335	0.377	0.423	0.36
78. Surabaya	0.391	0.422	0.387	0.39
79. Batu	0.290	0.360	0.344	0.30

3.3.2 *Relatif Inequality* (Kriteria Bank Dunia)

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan indeks gini hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi belum menjelaskan besarnya porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan wilayah. Dengan menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex, kita akan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality* atau biasa disebut dengan kriteria Bank Dunia. *Relative Inequality* diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat.

Berdasarkan hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Pasuruan berdasarkan pendekatan Kriteria Bank Dunia, menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Pasuruan selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 – 2017 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah pada tahun 2014, tetapi pada tiga tahun terakhir berada pada kategori ketimpangan sedang (*middle inequality*). Pada tahun 2016 dan 2017, ini ditunjukkan oleh porsi pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % dari penduduk berpendapatan rendah, berkisar antara 15,81 persen hingga 16,96 persen, yang berarti lebih rendah dari ambang batas 17 persen pendapatan, dan berada dalam kriteria *middle inequality* dalam kriteria Bank dunia. Dengan memperhatikan adanya perubahan porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen kelompok rumah tangga berpendapatan rendah selama periode 2014 -2017 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2014 kelompok ini menikmati sekitar 19,93 persen dari bagian pendapatan regional, kemudian pada tahun 2015 lebih rendah menjadi 16,62 persen, begitu pula pada tahun 2016, porsi pendapatan yang dinikmati oleh golongan rumah tangga berpendapatan rendah ini semakin menurun sebesar 15,81 persen, tetapi pada tahun 2017 porsi pendapatan yang dinikmati oleh golongan rumah tangga mengalami peningkatan sedikit menjadi 16,96 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat ketimpangannya pada tahun 2017 sedikit berkurang di banding tahun 2016. Kondisi ini mengindikasikan ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan, tetapi untuk tahun berikutnya tetap harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, bila ada keinginan untuk menurunkan proporsi penduduk miskin dimasa depan.

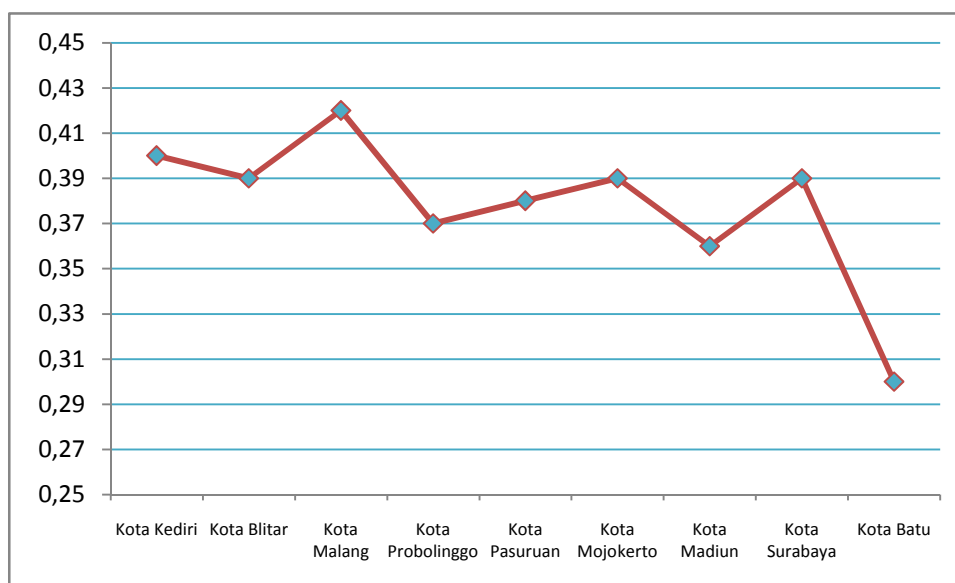
Masalah ketimpangan distribusi pendapatan antar waktu dan antar wilayah akan selalu menjadi perhatian dan menarik untuk diamati, karena merupakan bagian dari konsekuensi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah yang tidak akan pernah hilang. Dengan kriteria Bank Dunia secara umum terlihat adanya ketimpangan pendapatan dikota Pasuruan, hal ini ditunjukkan oleh persentase pendapatan kelompok 40% berpendapatan terendah yang berada di bawah 17 % dan terjadi kecenderungan penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 (19,93 -16,96). Kondisi yang sama diperlihatkan oleh koefisien Gini yang menunjukkan ketimpangan yang semakin meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2016, tetapi pada tahun 2017 koefisien gini mengalami penurunan sedikit dari tahun 2016. Hal ini ditunjukkan Koefisien Gini dari 0,308 pada tahun 2014 dan terus meningkat hingga mencapai 0,391 pada tahun 2015, dan tahun 2016 pada koefisien gini sebesar 0,397 sementara pada tahun 2017 ada penurunan sedikit menjadi 0.380 ini berarti secara total kedua ukuran ini memberikan hasil dengan kecenderungan yang hampir sama, yaitu sejak tahun 2014 ketimpangan distribusi pendapatan di kota pasuruan selama periode tigatahun terakhir cenderung meningkat, hingga pada dua tahun terakhir dalam kategori sedang dan mengalami penurunan ketimpangan pada tahun 2017. Untuk kota pasuruan kedua ukuran ketimpangan ini hampir tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti, namun Koefisien Gini cenderung meningkat pada level ketimpangan pendapatan yang rendah hingga sedang. Untuk provinsi jawa timur dalam empat tahun terakhir tahun 2014 – 2017 berada pada posisi ketimpangan distribusi pendapatan sedang. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan ketimpangan dalam kategori sedang dan perlu untuk terus diperhatikan, karena

ada indikasi kecenderungannya selama periode 2014 – 2017 mengalami peningkatan, jika tidak menjadi perhatian maka ketimpangan akan semakin tinggi.

3.4 PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH

Posisi Kota Pasuruan dalam indeks gini pada tahun 2017 di banding Kota Kota lain di Provinsi Jawa Timur, tergambar pada grafik berikut :

Gambar 3.7 Indeks Gini 2017 Kota Kota di Provinsi Jawa Timur

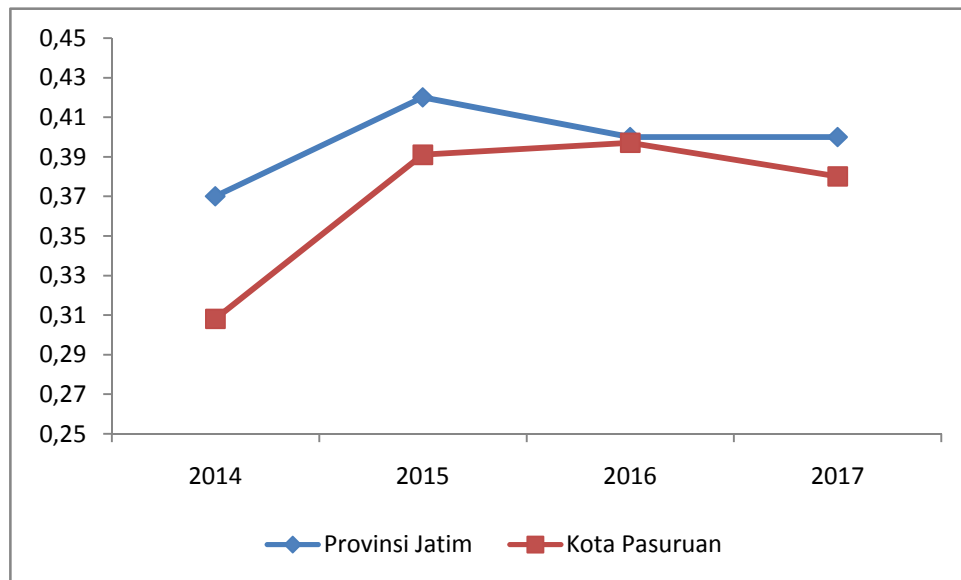


Kota Pasuruan dengan indeks gini 0.38 pada tahun 2017, berada posisi tengah, Indeks Gini Kota Pasuruan lebih rendah dari Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar, ini mengindikasikan bahwa pemerataan distribusi pendapatan Kota Pasuruan lebih baik di banding dari Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar, tetapi Indeks Gini Kota Pasuruan lebih tinggi di banding Kota Madiun, Kota Batu, dan Kota Probolinggo.

Indeks Gini Kota Pasuruan dengan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terlihat bahwa indeks gini kota pasuruan lebih rendah di banding indeks gini provinsi jawa timur dalam kurun waktu empat tahun

terakhir. Pada tahun 2016 Indeks Gini Kota Pasuruan hampir sama dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur. Jadi kurun empat tahun indeks gini Kota Pasuruan lebih baik di banding Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.8 Indeks Gini Kota Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur 2014 - 2017



BAB IV

KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Koefisien gini Kota Pasuruan selama kurun waktu empat tahun terakhir (2014 – 2017) mengalami fluktuasi dari posisi ketimpangan distribusi pendapatan rendah hingga sedang.
2. Koefisien gini Kota Pasuruan lebih rendah di banding koefisien gini Provinsi Jawa Timur, Koefisien gini Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir (2014 – 2017) stabil dalam posisi ketimpangan distribusi pendapatan sedang
3. Koefisien gini kota pasuruan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2014 – 2017) mengalami fase dari posisiketimpangan distribusi pendapatan rendah menuju ketimpangan distribusi pendapatan sedang. Hal ini berarti terjadi kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin melebar, tetapi pada tahun 2017 distribusi ketimpangan menurun di banding tahun 2016.
4. Menurut kriteria bank dunia persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% berpendapatan terendah kota pasuruan berada di atas 17 %, namun tetap memiliki fase yang tidak berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh koefisien gini.

4.2 SARAN SARAN

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang terus meningkat tetapi tidak diimbangi dengan kecenderungan tingkat pemerataan pendapatan yang tinggi atau ketimpangan distribusi pendapatan yang cenderung meningkat terutama dalam tiga tahun terakhir perlu diwaspadai. Program-program pengentasan kemiskinan harus terus dilanjutkan dan diperketat pengawasannya. Hal ini untuk menghindari kebocoran /tidak tepat sasaran.
2. Jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan harus mendapat perhatian khusus. Dengan memperhatikan dan memetakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut akan mempercepat proses pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya akan memperkecil tingkat kesenjangan distribusi pendapatan.

LAMPIRAN

1. Pengeluaran Rata rata Perkapita per bulan Menurut Kelompok Makanan

Kelompok Makanan <i>Food Group</i>	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan/ <i>Average Expenditure Per Capita Per Month</i>
(1)	(2)
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	59 467
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	4 104
Ikan/ <i>Fish</i>	41 566
Daging/ <i>Meat</i>	29 368
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	40 321
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	32 713
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	17 455
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	31 444
Minyak dan lemak/ <i>Oil and fats</i>	11 750
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	16 172
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	8 420
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	9 763
Makanan dan minuman jadi <i>Prepared food and beverages</i>	226 849
Tembakau dan sirih/ <i>Tobacco and betel</i>	47 678
Jumlah/<i>Total</i>	577 070

2. Pengeluaran Rata rata Perkapita per bulan Menurut Kelompok Bukan Makanan

Kelompok Non Makanan Non Food Group	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan/ <i>Average Expenditure Per Capita Per Month</i>
(1)	(2)
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air <i>Housing and household facility</i>	246 194
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	149 990
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	31 564
Barang yang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	52 081
Pajak pemakaian dan premi asuransi <i>Taxes and insurances</i>	35 160
Keperluan pesta dan upacara <i>Parties and ceremonies</i>	7 859
Jumlah/Total	522 848

3. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2014 - 2017

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
01. Pacitan	0.310	0.329	0.357	0.32
02. Ponorogo	0.309	0.358	0.364	0.34
03. Trenggalek	0.311	0.370	0.392	0.35
04. Tulungagung	0.310	0.360	0.368	0.35
05. Blitar	0.304	0.328	0.344	0.37
06. Kediri	0.310	0.336	0.382	0.34
07. Malang	0.333	0.376	0.324	0.35
08. Lumajang	0.234	0.290	0.346	0.31
09. Jember	0.262	0.329	0.310	0.34
10. Banyuwangi	0.288	0.342	0.334	0.34
11. Bondowoso	0.275	0.320	0.346	0.32
12. Situbondo	0.292	0.332	0.348	0.33
13. Probolinggo	0.316	0.298	0.312	0.36
14. Pasuruan	0.283	0.323	0.315	0.34
15. Sidoarjo	0.301	0.346	0.370	0.34
16. Mojokerto	0.268	0.314	0.301	0.32
17. Jombang	0.319	0.322	0.338	0.34
18. Nganjuk	0.304	0.346	0.355	0.33
19. Madiun	0.279	0.324	0.341	0.32
20. Magetan	0.320	0.338	0.370	0.39
21. Ngawi	0.336	0.341	0.342	0.34
22. Bojonegoro	0.285	0.319	0.318	0.29
23. Tuban	0.243	0.292	0.332	0.31
24. Lamongan	0.272	0.300	0.304	0.32
25. Gresik	0.282	0.312	0.325	0.29
26. Bangkalan	0.326	0.322	0.312	0.33
27. Sampang	0.233	0.302	0.305	0.29
28. Pamekasan	0.257	0.338	0.361	0.33
29. Sumenep	0.246	0.260	0.306	0.24
71. Kota Kediri	0.310	0.397	0.389	0.40
72. Kota Blitar	0.350	0.374	0.408	0.39
73. Kota Malang	0.373	0.376	0.414	0.42
74. Kota Probolinggo	0.332	0.361	0.305	0.37
75. Kota Pasuruan	0.308	0.391	0.397	0.38
76. Kota Mojokerto	0.313	0.356	0.374	0.39
77. Kota Madiun	0.335	0.377	0.423	0.36
78. Surabaya	0.391	0.422	0.387	0.39
79. Batu	0.290	0.360	0.344	0.30

4. Kemiskinan Kota Pasuruan 2010 - 2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	244 435	16,80	9,00
2011	269 543	15,70	8,39
2012	292 241	15,00	7,88
2013	316 862	14,60	7,57
2014	328 648	14,21	7,34
2015	343 392	14,52	7,47
2016	362 224	14,93	7,62
2017	378 593	14,85	7,53